



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULFIKAR HADIDH
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 252599

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.060.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 404 m2/365 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 404 m2/365 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 565.060.000
3. Tanah Seluas 676 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 287.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, GRAND LIVINA 1.5 XV MANUAL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV TIPE 2.0 G/MANUAL Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOTOR, KEEWAY MANUAL Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 56.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 95.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 300.076.007



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

1.682.636.007

III. HUTANG

Rp.

374.313.325

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.308.322.682

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.